

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam kategori Negara berkembang maka dari itu pemerintah perlu untuk mengupayakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia supaya kesejahteraan rakyat Indonesia dapat meningkat. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan Indonesia yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pelaksanaan pajak Indonesia diatur oleh pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang perpajakan agar mengikat semua orang untuk mematuhi, tercipta keadilan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Pajak bagi negara dihitung sebagai penerimaan akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang perusahaan pajak diakui sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Kepentingan dirjen pajak yang menargetkan penerimaan pajak yang besar dan rutin pasti bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan harus

melakukan manajemen pajak. Salah satu bentuk manajemen pajak yaitu *tax planning*. Banyak strategi yang dapat dilakukan dalam *tax planning*, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Strategi penghindaran pajak diperbolehkan oleh Negara akan tetapi merugikan Negara karena mengurangi penerimaan pajak yang diperoleh Negara. Terkait dengan *tax avoidance* direktorat jendral pajak menyampaikan di tahun 2012 terdapat 4000 perusahaan penanaman modal asing yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dan diketahui dari beberapa perusahaan tersebut ada yang melaporkan rugi selama 7 tahun berturut-turut (sunarsih dan oktavia, 2016). Fenomena perbedaan kepentingan antara pemungut pajak dengan wajib pajak dan tidak tercapainya estimasi penerimaan pajak yang dilihat di APBN Indonesia di tahun 2017 mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kementerian keuangan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan triwulan III mengestimasi pendapatan sebesar 1.497 triliun sedangkan realisasi pendapatan hanya sebesar 876 triliun, membuktikan tidak optimalnya penerimaan pajak negara Indonesia (www.kemenkeu.go.id). Begitu juga di sektor pertambangan terdapat indikasi *tax avoidance* dimana besaran pajak yang diterima dari sektor pertambangan hanya sebesar Rp 96,9 triliun. Nilai tersebut sangat kecil dibandingkan dengan PDB yang mencapai Rp 1.016 triliun, dimana rasio penerimaan pajak terhadap PDB sektor pertambangan hanya sebesar 9,4% (Membunuh Indonesia).

Tax avoidance adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak. *Tax avoidance* merupakan cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan

dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada. Berbeda dengan *tax evasion* yang melakukan pengurangan pajak secara ilegal atau lebih dikenal dengan penggelapan pajak. *Tax avoidance* sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan juga dapat meningkatkan *cash flow* perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang yang di refleksikan dalam rasio *leverage*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak eksternal yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Penggunaan utang sebagai salah sumber dana berdampak pada pembayaran bunga sebagai pengurang laba kena pajak, dengan demikian beban bunga menjadi insentif pajak bagi perusahaan (suprapti, 2017). Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Perusahaan dapat memilih pendanaan dengan hutang karena adanya biaya bunga sebagai pengurang pajak. Semakin tinggi rasio *laverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi juga usaha suatu perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh *board diversity* suatu perusahaan. *Board diversity* atau diversitas dewan merupakan persebaran perbedaan karakteristik anggota dewan komisaris dan direksi dalam suatu perusahaan (Wijaya dan Suprasto, 2015). *Board diversity* mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan mengenai implementasi

pendanaan dan *tax avoidance*. Leverage merupakan penggunaan sumber-sumber pembiayaan perusahaan jangka panjang atau jangka pendek. *Leverage* digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan pendanaan internal atau eksternal untuk memperbesar penghasilan pemilik perusahaan (Nursari dkk, 2017).

Salah satu aspek *board diversity* yaitu *gender* yang di tekankan pada jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Terdapat dua jenis pendanaan yang digambarkan dalam leverage yaitu pendanaan internal atau eksternal. Pendanaan internal merupakan pendanaan yang di dapat dari dalam perusahaan seperti berupa laba ditahan dan pendanaan eksternal merupakan pendanaan yang di dapat dari luar perusahaan seperti berupa hutang. Penelitian yang dilakukan putri dan putra (2017) dengan menggunakan rasio *debt to equity* menunjukan *leverage* memiliki pengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian marfirah dan syam (2016) juga menunjukan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memanfaatkan pembiayaan melalui hutang untuk mendapatkan insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* cenderung menggunakan pendanaan eksternal berupa hutang dari pada menggunakan pendanaan internal karena hutang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan pendanaan hutang maka akan terdapat resiko berkurangnya kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya yang dapat mempengaruhi kepercayaan kreditur. Resiko tersebut

yang ditanggapi berbeda antara anggota dewan laki-laki dan dewan perempuan. Menurut Booth dan Nolen (2009) pria cenderung berani mengambil resiko (risk taker) dibandingkan dengan wanita yang lebih suka untuk menghindari resiko (risk averse).

Penelitian ini penting dilakukan karena masih belum adanya konsistensi hasil penelitian terdahulu dimana pada penelitian (Nursari dkk, 2017; Marfirah dan Syam, 2016; Putri dan Putra, 2017) menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan pada penelitian (Ngadiman dan Puspitasari, 2014; Munandar dkk, 2016) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan dengan menambahkan *board diversity* sebagai variabel moderating dan menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena yang ada pada latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *board diversity* memoderasi hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

- b. Untuk menganalisis apakah *board diversity* menguatkan atau melemahkan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi, khususnya dalam kajian tentang *leverage* dan *tax avoidance*. selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pembanding bagi peneliti selanjutnya

b. Praktis

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kantor pelayanan pajak bahwa *leverage* memiliki potensi adanya *tax avoidance*.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber informasi serta referensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang perpajakan